



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM**

JALAN PANCORAN TIMUR II NOMOR 1 PANCORAN, JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 7996109; FAKSIMILE (021) 7996109; SITUS <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

LEMBAR PENGESAHAN DESAIN PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Heni Kartikawati
NIP : 19701218 199603 2 001
jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

dengan ini menyatakan bahwa desain pembelajaran untuk program sebagai berikut:

nama program : E-Learning Dasar-Dasar Pengetahuan Hukum
deskripsi : *E-Learning* ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan terkait pengetahuan hukum dasar untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unitnya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat memahami konsep dasar hukum yang terdiri dari hukum materiil dan formil (hukum acara) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Materi program pembelajaran ini mencakup pengetahuan dasar terkait konsep hukum dan hukum acara perdata, pidana, Tata Usaha Negara (TUN), dan kepaillitan serta keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik. Selama proses pembelajaran peserta akan mengikuti aktivitas pembelajaran dan memperoleh pengayaan materi, sehingga peserta dapat memperluas wawasannya dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait dasar-dasar pengetahuan hukum berdasarkan kaidah yang ada untuk membantu proses retensi pengetahuan dan keterampilan. Guna mengetahui peningkatan pengetahuan peserta, peserta akan diberikan *Pre-test* sebelum proses pembelajaran dan *Post-test* di akhir proses pembelajaran.

Untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang bersifat luas dan meningkatkan aksesibilitas pembelajaran, program pembelajaran dirancang menggunakan model pembelajaran *full asynchronous e-learning* yang menekankan pada kemandirian peserta, fleksibilitas waktu belajar, dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

jumlah hari : 8 hari efektif

jumlah jam pelajaran : 24

dapat digunakan sebagai desain pembelajaran di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum.

Jakarta, 03 September 2021

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Umum



Ditandatangani secara elektronik

Heni Kartikawati

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
<i>E-Learning Dasar-Dasar Pengetahuan Hukum</i>	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	<p><i>E-Learning</i> ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan terkait pengetahuan hukum dasar untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unitnya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat memahami konsep dasar hukum yang terdiri dari hukum materiil dan formil (hukum acara) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya.</p> <p>Materi program pembelajaran ini mencakup pengetahuan dasar terkait konsep hukum dan hukum acara perdata, pidana, Tata Usaha Negara (TUN), dan kepailitan serta keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik. Selama proses pembelajaran peserta akan mengikuti aktivitas pembelajaran dan memperoleh pengayaan materi, sehingga peserta dapat memperluas wawasannya dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait dasar-dasar pengetahuan hukum berdasarkan kaidah yang ada untuk membantu proses retensi pengetahuan dan keterampilan. Guna mengetahui peningkatan pengetahuan peserta, peserta akan diberikan <i>Pre-test</i> sebelum proses pembelajaran dan <i>Post-test</i> di akhir proses pembelajaran.</p> <p>Untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang bersifat luas dan meningkatkan aksesibilitas pembelajaran, program pembelajaran dirancang menggunakan model pembelajaran <i>full asynchronous e-learning</i> yang menekankan pada kemandirian peserta, fleksibilitas waktu belajar, dapat diakses kapan saja dan dimana saja.</p>
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p><i>E-Learning</i> ini merupakan hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran yang bersifat Jabatan dari unit Direktorat Jenderal Keuangan Negara guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terkait dengan pendampingan hukum pada perkara pidana dan penyusunan dokumen penanganan perkara di lingkungan unit kerjanya.</p>
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
	<p>Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan, direkomendasikan untuk pegawai yang bertugas atau akan ditugaskan pada bidang yang membutuhkan pengetahuan dasar terkait ilmu hukum.</p>

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
 - E-Learning (full asynchronous)*
 - Bimbingan di Tempat Kerja
 - Pelatihan Jarak Jauh
 - Magang
 - Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta
 - Mentoring*

STANDAR KOMPETENSI

1. Menguraikan konsep Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata;
2. Menguraikan konsep Pidana dan Hukum Acara Pidana;
3. Menguraikan konsep Hukum Tata Usaha Negara (TUN) dan Hukum Acara Tata Usaha Negara (TUN);
4. Menguraikan konsep Hukum Kepailitan dan Hukum Acara Kepailitan; dan
5. Menjabarkan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Penyelesaian sengketa informasi publik.

KOMPETENSI DASAR

1. Menguraikan konsep Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata;
 - a. menafsirkan pengertian, sejarah, dan ruang lingkup hukum perdata;
 - b. menguraikan ketentuan hukum perdata tentang orang, benda, perikatan, pembuktian, dan daluarsa;
 - c. menafsirkan pengertian, sumber, dan asas Hukum Acara Perdata;
 - d. menjabarkan proses Hukum Acara Perdata di tingkat Pertama;
 - e. menjabarkan proses hukum acara perdata di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan Kembali; dan
 - f. menguraikan ketentuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Menguraikan konsep Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
 - a. menafsirkan pengertian, sejarah, dan ruang lingkup hukum pidana;
 - b. merinci penggolongan tindak pidana;
 - c. menafsirkan pengertian, sumber, dan asas Hukum Acara Pidana;
 - d. menjabarkan proses hukum acara pidana; dan
 - e. menjabarkan pendampingan perkara pidana.
3. Menguraikan konsep Hukum Tata Usaha Negara (TUN) dan Hukum Acara Tata Usaha Negara (TUN);
 - a. menafsirkan pengertian dan ruang lingkup TUN;
 - b. menguraikan objek hukum TUN;
 - c. menguraikan bentuk-bentuk perbuatan hukum pemerintah;
 - d. menafsirkan pengertian sumber, dan asas Hukum Acara TUN; dan

- e. mengemukakan proses hukum acara TUN.
4. Menguraikan konsep Hukum Kepailitan dan Hukum Acara Kepailitan;
 - a. menguraikan dasar penyelesaian utang;
 - b. menjabarkan prosedur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
 - c. menerangkan proses Hukum Acara Kepailitan; dan
 - d. menguraikan keterkaitan antara Hukum Kepailitan dengan pengurusan piutang negara dan lelang.
5. Menjabarkan ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Penyelesaian sengketa informasi publik;
 - a. mengemukakan ruang lingkup pelayanan informasi publik;
 - b. menjabarkan pengelolaan informasi publik;
 - c. mengemukakan asas penyelesaian sengketa informasi publik dan pihak-pihaknya; dan
 - d. menjabarkan proses penyelesaian sengketa informasi publik.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	a. Pengetahuan Dasar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata	-	6	6	1
		b. Pengetahuan Dasar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana	-	6	6	2
		c. Pengetahuan Dasar Hukum TUN dan Hukum Acara TUN	-	3	3	3
		d. Pengetahuan Dasar Hukum Kepailitan dan Hukum Acara Kepailitan	-	6	6	4
		e. Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	-	3	3	5
2	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-	-	
3	Ceramah	-	-	-	-	
4	PKL	-	-	-	-	
5	<i>Outbound</i>	-	-	-	-	
6	MFD	-	-	-	-	
7	Pengarahan Program	-	-	-	-	

8	Action Learning	-	-	-	-	-		
TOTAL JP			24 JP					
TOTAL WAKTU UJIAN (PRE-POST TEST @45 menit)			90 menit					
DILAKSANAKAN DALAM (HARI EFEKTIF)			8 hari efektif					
<input type="checkbox"/>	Non Tatap Muka	: 8						
<input type="checkbox"/>	Tatap Muka Virtual	: -						
<input type="checkbox"/>	Action Learning	: -						
	- Mandiri	: -						
	- Tatap Muka Virtual	: -						
JENIS DAN JENJANG PROGRAM								
E-Learning Dasar-Dasar Pengetahuan Hukum ini merupakan pelatihan berjenjang dasar.								
PERSYARATAN PESERTA								
Administrasi								
1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan; dan								
2. Calon peserta direkomendasikan pegawai yang memiliki penugasan dan/atau ketertarikan di bidang yang bersangkutan dengan hukum dan/atau penanganan perkara dan/atau <i>legal drafting</i> ;								
Kompetensi								
1. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.								
Lain-lain								
1. Melengkapi diri dengan perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang diperlukan selama proses pembelajaran (<i>Desktop Computer, PC, laptop</i>); dan								
2. Memiliki akses jaringan internet selama proses pembelajaran.								
KUALIFIKASI PENGAJAR								
Umum								
1. Pendidikan Minimal Sarjana (Strata-1);								
2. Mempunyai Pengalaman Mengajar;								
3. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.								
Khusus								
1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu, khususnya terkait Konsep dan dasar-dasar ilmu hukum;								
2. Memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan; dan								

3. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta.

Catatan

Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi **moderator/pengajar/narasumber** yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait substansi) pada “Forum” di *Kemenkeu Learning Center* dan/atau memberikan tatap muka (*online*) kepada peserta melalui “*Web-Seminar/Video Conference*”.

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

Evaluasi Penyelenggaraan Tertulis dan Evaluasi Tatap Muka serta Evaluasi Pengajar Tertulis/*Online*.

EVALUASI LEVEL 2

1. *Pre-Post Test* berbentuk pilihan ganda untuk setiap Mata Pelajaran, bersifat non-kelulusan, tanpa kesempatan *retake* dan tanpa batasan nilai minimal dengan waktu penyelesaian 45 menit untuk setiap *test*;
2. Alokasi jumlah soal untuk masing-masing mata pelajaran adalah sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Jumlah Soal
a.	Pengetahuan Dasar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata	8
b.	Pengetahuan Dasar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana	8
c.	Pengetahuan Dasar Hukum TUN dan Hukum Acara TUN	4
d.	Pengetahuan Dasar Hukum Kepailitan dan Hukum Acara Kepailitan	6
e.	Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	4
TOTAL		30

3. Ketentuan Lencana (*Badge*)
 - a. Peserta berhak mendapatkan *badge* setelah menyelesaikan *e-learning*;
 - b. *Badge* merupakan bukti absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti dan menyelesaikan setiap *e-learning*;
 - c. *Badge* secara otomatis akan tampil pada setiap profil peserta di *Kemenkeu Learning Center* (KLC).
4. Ketentuan Sertifikat
Sertifikat diberikan setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian *E-Learning* dan mengakhiri pelatihan.

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

1. *Online materials*;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembelajaran; dan
3. Petunjuk Penggunaan *Kemenkeu Learning Center (KLC)*.

LAIN-LAIN

1. *E-Learning* Kearsipan ini merupakan program pembelajaran yang seluruhnya dilakukan secara *online*;
2. Adapun ketentuan penyelesaian rangkaian pembelajaran *e-learning* ini adalah Peserta wajib menyelesaikan 100% materi *e-learning* dan mengklik tombol 'akhiri pelatihan' pada KLC;
3. Peserta wajib memberikan rewiu untuk program *e-learning* yang diselesaikan melalui *course reviews* di KLC.

Keterangan:

E-Learning ini merupakan program baru Pusdiklat Keuangan Umum di Tahun Anggaran 2021 hasil konversi dari E-Learning Dasar-Dasar Pengetahuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KNPK tahun 2019, untuk memenuhi Hasil AKP Jabatan unit-unit di lingkungan DJKN. Perbedaan meliputi, namun tidak terbatas pada, penyesuaian format dengan KAP *existing* di lingkungan Pusdiklat KU, penyesuaian kata kerja operasional untuk standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan penambahan jumlah soal-soal pre-post test pada bagian evaluasi. Adapun KAP idusun berdasarkan Rapat Pembahasan Desain Pembelajaran *E-Learning* Dasar-Dasar Pengetahuan Hukum bagi Pegawai DJKN dan Pelatihan Jarak Jauh Penanganan Perkara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tanggal 2 September 2021 sesuai dengan undangan Kepala Pusdiklat Keuangan Umum nomor UND-657PP.7/2021, UND-661/PP.7/2021 dan UND-662/PP.7/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Undangan Rapat Pembahasan Desain Pembelajaran *E-Learning* Dasar-Dasar Pengetahuan Hukum bagi Pegawai DJKN dan Pelatihan Jarak Jauh Penanganan Perkara DJKN. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku *stakeholder* dan SGO; Bapak Agus Suharsono dan Ibu Rachmatunissya selaku Widyaiswara selaku Widyaiswara pengelola program; dan perwakilan bidang/bagian Pusdiklat Keuangan Umum. Finalisasi desain pembelajaran dilakukan lebih lanjut melalui koordinasi informal dengan Widyaiswara Pengelola Program dan *Skill Group Owner* dengan mempertimbangkan ketentuan pencegahan wabah pandemi COVID-19. (CHY)

Jakarta, 3 September 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati

RENCANA RUNDOWN
E-LEARNING DASAR-DASAR PENGETAHUAN HUKUM

No	Mata Pelajaran (MP)	Jam Pelajaran (JP)
1	Hari 1 - Pre-test	30 menit
2	Hari 1 – MP Pengetahuan Dasar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata a. menafsirkan pengertian, sejarah, dan ruang lingkup hukum perdata; dan b. menguraikan ketentuan hukum perdata tentang orang, benda, perikatan, pembuktian, dan daluarsa.	6
	Hari 2 – MP Pengetahuan Dasar Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata a. menafsirkan pengertian, sumber, dan asas Hukum Acara Perdata; b. menjabarkan proses Hukum Acara Perdata di tingkat Pertama; c. menjabarkan proses hukum acara perdata di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan Kembali; dan d. menguraikan ketentuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).	
3	Hari 3 – MP Pengetahuan Dasar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana a. menafsirkan pengertian, sejarah, dan ruang lingkup hukum pidana; dan b. merinci penggolongan tindak pidana.	6
	Hari 4 – MP Pengetahuan Dasar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana a. menafsirkan pengertian, sumber, dan asas Hukum Acara Pidana; b. menjabarkan proses hukum acara pidana; dan c. menjabarkan pendampingan perkara pidana.	
4	Hari 5 – MP Pengetahuan Dasar Hukum TUN dan Hukum Acara TUN a. menguraikan dasar penyelesaian utang; b. menjabarkan prosedur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); c. menerangkan proses Hukum Acara Kepailitan; dan d. menguraikan keterkaitan antara Hukum Kepailitan dengan pengurusan piutang negara dan lelang.	3
5	Hari 6 – MP Pengetahuan Dasar Hukum Kepailitan dan Hukum Acara Kepailitan a. menguraikan dasar penyelesaian utang; dan b. menjabarkan prosedur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).	6
	Hari 7 – MP Pengetahuan Dasar Hukum Kepailitan dan Hukum Acara Kepailitan a. menerangkan proses Hukum Acara Kepailitan; dan	

No	Mata Pelajaran (MP)	Jam Pelajaran (JP)
	b. menguraikan keterkaitan antara Hukum Kepailitan dengan pengurusan piutang negara dan lelang.	
6	Hari 8 – MP Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a. mengemukakan ruang lingkup pelayanan informasi publik; b. menjabarkan pengelolaan informasi publik; c. mengemukakan asas penyelesaian sengketa informasi publik dan pihak-pihaknya; dan d. menjabarkan proses penyelesaian sengketa informasi publik.	3
8	Hari 8 – Post-test	30 menit

Catatan:

Rundown ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerangka Acuan Program untuk dapat dijadikan acuan dalam proses pembelajaran;

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat,



Ditandatangani secara elektronik
Pandu Patriadi